

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakatnya (Arif, 2008:3).

Orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*. *Good governance government* adalah pemerintahan yang sangat diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dimana pemerintahannya berjalan dengan baik tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pejabat daerahnya. Wajar saja masyarakat berhak untuk menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Liza dan Yuneita, 2015).

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat 1 bahwa Pengelolaan Keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Hal ini tentunya dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

PSAP 01 tahun 2020 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam pengelolaan keuangan publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No 64 Tahun 2013 mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akreal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan dapat dipahami oleh para pengguna. Artinya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus berkualitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012). Namun kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai, yang berhasil ditemukan oleh BPK (Mardiasmo, 2012:8). Selanjutnya Ketua BPK Agung Firman (2020) menyampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah masih kurang memuaskan karena masih banyak ditemukannya permasalahan. Pernyataan Agung Firman tersebut, didukung dengan data mengenai banyaknya temuan BPK atas LKPD tahun 2019 yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, baik temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern maupun temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan, dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan 1.2.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Temuan Audit BPK atas**  
**Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada LKPD Tahun 2019**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.729	33	518
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.338	45	526
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.108	22	426
Total		<b>5.175</b>	<b>100</b>	<b>541</b>

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020

**Tabel 1.2**  
**Hasil Temuan Audit BPK atas**  
**Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada**  
**LKPD Tahun 2019**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
1	Kerugian	2.147	898.301,46	521
2	Potensi Kerugian	359	342.865,36	250
3	Kekurangan Penerimaan	715	285.746,53	390
4	Penyimpangan Administrasi	2.103		523
Total		<b>5.324</b>	<b>1.526.913,35</b>	<b>541</b>
Nilai penyerahan aser atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan			<b>285.789,34</b>	<b>424</b>

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020

Dengan banyaknya temuan permasalahan-permasalahan oleh BPK tersebut menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tidak berkualitas dikarenakan informasi yang disajikan laporan keuangan tersebut tidak relevan serta tidak dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Terdapat empat opini yaitu: Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan Menolak memberika Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Desy Sefri, 2014). Dwi Kusumawati (2017), mengungkapkan bahwa ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Pernyataan Dwi Kusumawati dapat didukung dengan data mengenai perkembangan hasil audit BPK atas LKPD di tingkat pemerintahan di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019, dapat dilihat dalam tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019**  
**Tingkat Pemerintah di Indonesia**

Tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2015	85%	15%	0%	0%	100%	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%	100%
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020

Dari data perkembangan opini yang diberikan BPK atas LKPD tahun 2015-2019 terlihat bahwa jumlah opini WTP dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan, dan dibandingkan dengan opini WDP (wajar dengan pengecualian), TW (tidak wajar) dan TMP (tidak memberikan pendapat/*disclaimer*) relatif mengalami penurunan. Itu artinya pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari data IHPS tahun 2015-2019 atas opini yang diberikan BPK untuk Provinsi Jawa Barat masih banyak pemerintah daerah yang masih memperoleh opini BPK selain WTP, seperti yang terlihat pada tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Tahun 2015-2020**  
**Provinsi Jawa Barat**

No	Entitas Pemerintah Daerah LKPD	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020

Dilihat dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa opini yang diberikan BPK terhadap LKPD Kota Bandung sejak tahun 2015-2017 mengalami kestabilan opini yaitu WDP. Dengan kestabilan opini WDP yang diberikan BPK terhadap Pemkot Bandung menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang masih kurang baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik tersebut akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya Ketua BPK Agus Firman, menyampaikan bahwa ada tiga poin yang menjadikan Pemkot Bandung kembali gagal meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2017. Tiga poin permasalahan tersebut terkait dengan masalah penatausahaan asset, diantaranya: (1) Asset tetap senilai Rp1,12 triliun tidak sesuai dengan nilai perolehan dan tidak diketahui keberadaanya; (2) utang jangka pendek senilai Rp5 miliar belum didukung dengan rinciannya; (3) sewa-menyewa asset milik Pemkot tidak jelas pembaharuan kontraknya. Agus menyebutkan Pemerintah Kota Bandung belum pernah meraih opini WTP. Bahkan pada tahun 2010 Laporan Keuangan Pemkot Bandung pernah memperoleh disclaimer, baru dari tahun 2011 sampai 2017 meraih WDP secara konsisten. (Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah-Republika.co.id, 2018)

Terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dapat terwujud dengan sistem akuntansi yang baik dan benar, tetapi untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan beberapa komponen. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem pengendalian internal pemerintah (Halim, 2012:168).

Kompetensi sumber daya manusia adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaan yang ditekuninya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten dan memahami dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Semakin bagus kompetensi sumber daya manusianya maka akan semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Reno Julia Utama, 2017). Yoseprinaldi (2013) menyatakan bahwa kegagalan sumber daya manusia pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Ketidapahaman aparat pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Kualitas kompetensi Pegawai ASN yang beragam mengharuskan instansi pemerintah melaksanakan program pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Dan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 70 ayat (1) dan (2) tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.



Sekretaris BPSDM Kemendagri Dindin Wahidin (2020) menyebutkan bahwa kualitas ASN di Indonesia masih kurang berkompeten sehingga akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin (2018), menyatakan bahwa kurangnya aparatur pemerintah daerah yang menempuh pendidikan akuntansi di Pemkot Bandung. Selain itu kurangnya tenaga akuntan tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkot Bandung tetapi juga daerah lain karena saat ini tidak ada pembukaan formasi CPNS sebagai akuntan. Meski begitu Solihin akan mengupayakan dengan menugaskan ASN Pemkot Bandung untuk menempuh pendidikan akuntan agar pemahaman aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan daerah menjadi lebih baik dan benar. Hal itu akan dilakukan merata di setiap perangkat daerah yang tidak memiliki tenaga akuntan. (Tri Ispranoto – detikNews, 2018)

Selain kompetensi sumber daya manusia hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam mengolah data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalisasi berbagai kesalahan yang diakibatkan *human error*, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan

daerah yang berkualitas. semakin baik pemanfaatan teknologi maka kualitas laporan akan semakin baik juga (Harnoni, 2016).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Aldiani (2010) mengemukakan bahwa ketersediaan perangkat pendukung akan membantu LKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan informasi yang berkualitas. Perangkat pendukung tersebut tidak lain berupa teknologi informasi (*hardware dan software*) yang memadai.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2020) saat ini pengimplementasian teknologi informasi yang tidak mudah oleh aparatur pemerintah daerah dan dihadapkan pada arus globalisasi yang bersifat virtual tanpa melihat batas teoritis sehingga persaingan saat ini semakin kompetitif dan menantang. Untuk itu Kemendagri terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah. Oleh sebab itu, penetrasi arus deras globalisasi (*hyper-globalization*) dan teknologi informasi saat ini, menuntut birokrasi Kemendagri harus siap menghadapi *global governance*. Dalam persaingan antar negara tidak lagi bisa dikendalikan di belakang meja atau di ruang rapat, melainkan di ruang-ruang digital, karena sudah masuk dalam periode digital

governance. Diharapkan perkembangan teknologi informasi mampu dijadikan instrumen bagi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan inovatif. (Liputan6.com, 2020).

Oleh karena itu, walaupun pegawai merasakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi informasi, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan teknologi secara maksimal. Padahal untuk dapat terlaksannya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan teknologi informasi yang memadai (Pramudiarta, 2015)

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah yang belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu faktornya yaitu penyajian jujur dan netralitas. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliable.

Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian oleh Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, Astrid Maharani (2019) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini kompetensi

sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilis Wijayanti (2017) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan Ikhwanul Haza (2015) mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari salah satu penelitian diatas yaitu yang dilakukan oleh Lilis Wijayanti (2017) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Namun pada penelitian tersebut peneliti tidak menggunakan variabel Sistem Pengendalian Intern untuk diteliti.

Pada penelitian sebelumnya terdapat keterbatasan yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan replikasi yakni perluasan wilayah sampel penelitian yang menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah seluruh pegawai DPPKAD di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu PPK-SKPD yang terdiri dari Kepala Badan dan Subbagian Akuntansi di BPKAD Kota Bandung serta Auditor di Inspektorat Kota Bandung. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan terhadap hasil penelitian dengan sampel yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan lainnya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Sukoharjo sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bandung. Alasan penelitian di Kota Bandung karena berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas bahwa LKPD Kota Bandung sejak tahun 2015-2017 mengalami kestabilan opini yaitu WDP sehingga berdampak pada berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Bandung.

2. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel kompetensi sumber daya manusia, penulis menggunakan dimensi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan menurut Sudarmanto (2015:53), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi kemampuan individu, organisasi dan kelembagaan dan sistem untuk pencapaian tujuan menurut Indriasari dan Nahartyo (2008).
3. Perbedaan selanjutnya penggunaan dimensi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi, penulis menggunakan dimensi perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data dan komunikasi data menurut Jogyanto (2009:3), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi perangkat, pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer menurut Jurnal dan Supomo (2012).

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan teori dan uraian di atas serta didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai akuntansi

pemerintahan dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada BPKAD dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:



#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi atau sumbangan ilmu bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi pada umumnya, dan khususnya akuntansi sektor publik serta akuntansi pemerintah Indonesia terutama dalam hal pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait yakni sebagai berikut :

1. **Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi khususnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. **Bagi Instansi Pemerintah**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi, khususnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dokumen akademik dan juga sebagai acuan bagi aktivitas akademik mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 4. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan maupun informasi kepada pihak-pihak lain serta dapat dijadikan bahan referensi sebagai masukan dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung yang berada di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung dan Inspektorat Kota Bandung yang berada di Jalan Tera No.20 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil adalah bulan Maret 2021 sampai selesai.